

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERANGKAT DAERAH : BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

TUGAS : Membantu SekdaprovSU dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah atas pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan kewenangan otonomi Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta akuntabilitas dan analisa jabatan

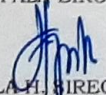
FUNGSI : 1. Penyelenggaraan penyiapan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi monitoring, evaluasi, kebijakan, koordinasi dan pengendalian dan penataan pengembangan organisasi, perangkat daerah; ketatalaksanaan, pemantapan peningkatan akuntabilitas dan analisa jabatan perangkat daerah  
 2. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, Penetapan sistem ketatalaksanaan, mekanisme/produker, pelayanan umum serta peningkatan akuntabilitas dan analisa jabatan Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan	Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	$\frac{\text{Jumlah Perkada Perangkat Daerah yang tersusun}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bagian Kelembagaan Biro Organisasi SetdaprovSU
		2 Persentase rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diusulkan}} \times 100\%$	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
		3 Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Permenpan Nomor 33 tahun 2013 tentang Pedoman Analisa Jabatan sebagaimana telah dirubah pada Permenpan Nomor 1 tahun 2020	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang sudah menyusun}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bagian Akuntabilitas dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setdaprovsu
2	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tingkat capaian kualitas unsur pelayanan publik, sesuai dengan Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setdaprovsu
3	Meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai capaian pelaporan kinerja	Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Laporan hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	Bagian Akuntabilitas dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setdaprovsu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

  
APRILLA H. NIREGAR  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI